



Wurian Yacob<sup>1</sup>  
Yosefina Andia  
Dekrita<sup>2</sup>  
Maria Modesta Missi  
Mone<sup>3</sup>

## PERAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SIKKA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam menata ruang wilayah Kabupaten Sikka sebagai landasan untuk pembangunan terencana, terarah, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perkembangan wilayah tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data dari dokumen perencanaan dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (RTRW) Kabupaten Sikka memfasilitas koordinasi antar sektor dalam perencanaan pembangunan, memberikan pedoman bagi penggunaan lahan yang berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk penyesuaian dengan perubahan dinamika wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran RTRW Kabupaten Sikka dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

**Kata Kunci:** Rencana Tata Ruang Wilayah, Perencanaan Pembangunan Daerah

### Abstract

This research aims to analyze the role Regional Spatial Planning (RTRW) in organizing the regional space of Sikka Regency as a basis for planned, directed and sustainable development. Regional Spatial Planning is an important instrument in directing the development of the region. This research method uses a qualitative descriptive method, by collecting data from planning documents and interviews with relevant stakeholders. The research results show that (RTRW) Sikka Regency facilitates coordination between sectors in development planning, provides guidelines for sustainable land use, and maintains a balance between economic, social and environmental aspects. However, the challenges faced include adapting to changes in regional dynamics. This research concludes that the role of the Sikka Regency RTRW in regional development planning is very important to achieve sustainable development in the future.

**Keyword :** Regional Spatial Planning, Regional Development Planning

### PENDAHULUAN

Merdeka Belajar - Kampus merdeka adalah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda atau mahasiswa untuk berkarir dimasa depan dengan memberikan kesempatan untuk mengasah dan menggali minat dan bakat mereka serta mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Selama pelaksanaan magang, mahasiswa akan mengalami keterlibatan langsung dengan dunia kerja, mengamati langsung permasalahan di tengah masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan magang adalah untuk melatih peserta magang mengatasi dan menangani masalah yang dijumpai di dunia kerja.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) sebagai salah satu perangkat daerah pada lingkup pemerintahan Kabupaten Sikka yang mempunyai tugas membantu Bupati

<sup>1,2,3</sup>Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa  
email: wurianyacob@gmail.com

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan penelitian dan pengembang. Bapelitbang Kabupaten Sikka menjalankan fungsinya untuk melakukan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan, menyusun perencanaan kebijakan anggaran daerah, mengkoordinasi, mengendalikan, memantau dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Program magang periode ini dikasih kepercayaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan dimana bidang tersebut menjalankan tugas mengkoordinasi, asistensi, monitoring dan mengevaluasi yakni 5 (lima) perangkat daerah yaitu Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan (DISHUB), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinas Perkimtan), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kominfo, 21 kecamatan dan 13 kelurahan yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.

Rencana Tata Ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kabupaten Sikka yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka beserta dengan jangka waktu perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun, yaitu dari Tahun 2012-2032.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menitikberatkan pada pemerintah daerah kabupaten/kota telah memberikan dampak terhadap penataan ruang wilayah kabupaten/kota, terutama adanya pemekaran wilayah. Pemekaran Wilayah di Kabupaten Sikka dari 12 Kecamatan menjadi 21 Kecamatan. Kecamatan-kecamatan baru hasil pemekaran, meliputi Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kangae, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Doreng, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Tanawawo, dan Kecamatan Waigete dengan luasnya masing-masing.

Tabel 1. Kecamatan dan luas wilayah per kecamatan tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km	%
1	Paga	82,85	4,78
2	Tanawawo	79,78	4,61
3	Mego	111,26	6,42
4	Lela	31,33	1,81
5	Bola	56,83	3,28
6	Doreng	30,41	1,76
7	Mapitara	81,02	4,61
8	Talibura	260,11	15,02

9	Waiblama	144,36	8,34
10	Waigete	217,65	12,57
11	Kewapante	24,14	1,39
12	Hewokloang	17,58	1,02
13	Kangae	38,43	2,22
14	Nelle	14,65	0,85
15	Koting	23,56	1,36
16	Palue	41	2,37
17	Nita	141,07	8,15
18	Magepanda	166,15	9,59
19	Alok	14,64	0,85
20	Alok Barat	62,75	3,62
21	Alok Timur	92,34	5,22
	Jumlah	1731,91	100

Adanya masalah-masalah lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memerlukan penanganan prioritas agar tidak menjadi kendala dalam upaya pengembangan wilayah, yaitu masalah bencana banjir, kekeringan, abrasi, dan tanah longsor. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan perlu disesuaikan dengan potensi dan kendala wilayah tersebut agar dapat menghadapi segala hambatan, ancaman dan peluang.

Fokus dari laporan akhir yang penulis buat yakni tentang peran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sikka dalam perencanaan pembangunan daerah yang tentunya sesuai dengan bidang kerja yang selama ini penulis kerjakan selama kegiatan magang berlangsung pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.

## **METODE**

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Jalan Mawar Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Kegiatan magang kerja dijalankan selama kurang lebih empat bulan terhitung dari tanggal 16 Agustus 2023 sampai tanggal 23 Desember 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kegiatan. Data yang dikumpulkan dengan metode wawancara bersama Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Dengan adanya pemekaran wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah sangat memberikan arahan dan pedoman untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah sehingga pelayanan untuk di tiap kecamatan yang dulunya masih 12 kecamatan sekarang menjadi 21 kecamatan sudah sangat terjangkau. Jangkauannya mulai dari sektor pengaturan rencana pola ruang Kabupaten Sikka terdiri dari dalam kawasan lindung dan kawasan budidayapengembangan pembangunan wilayah Kabupaten Sikka masih tertinggal. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi tentunya menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Sikka.
2. Pemekaran wilayah sudah menciptakan keseimbangan antar wilayah dalam pengembangan ekonomi dan sosial dapat merata di berbagai wilayah dan sudah tersusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah

juga melibatkan partisipasi masyarakat dan itu wajib dilibatkan karena rencana tata ruang direncanakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pemekaran wilayah juga sangat berperan dalam mengelola ruang terbuka hijau dan konservasi alam seperti pelestarian ekosistem, hutan dan daerah resapan air. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga pengembangan wilayah ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan pastinya tidak akan merugikan generasi mendatang.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga berperan dalam mengelola kawasan permukiman yang terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan.
  - a. Kawasan Permukiman Perkotaan  
Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sikka merupakan bagian dari proses penataan ruang wilayah Kabupaten Sikka dengan kawasan tersebut adalah kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama memberikan kesempatan pada daerah tersebut untuk berkembang menjadi daerah perkotaan dengan daerah permukiman berkonsentrasi tinggi yang ditunjang oleh kegiatan pembangunan perkotaan yang pesat.
  - b. Kawasan Permukiman Perdesaan  
Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan yang memiliki karakteristik membentuk pola yang menyebar dalam setiap kecamatan dengan kelompok permukiman yang menyebar dalam setiap desa. Keberadaan permukiman perdesaan ini dengan masing-masing pusat-pusat desanya tidak begitu signifikan luasnya dalam pola ruang eksisting Kabupaten Sikka.
4. Kabupaten Sikka terletak di ujung timur Pulau Flores, memiliki luas wilayah 167.776,60 Ha dengan batas-batas administrasi wilayah yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ende, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Secara geografis Kabupaten Sikka terletak antara 80 22' dengan 8050 derajat Lintang Selatan dan 121° 55' 40'' sampai 122° 41' 30'' Bujur Timur.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah sudah memberikan dasar hukum bagi penyusun perencanaan dan pembangunan ditingkat kabupaten kota. Dasar hukum yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat kabupaten/kota yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini menyediakan kerangka dasar bagi penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, termasuk perencanaan wilayah yang melibatkan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan termasuk tata ruang wilayah di kabupaten/kota.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abe. A. (2005). *Perencanaan daerah partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Andiana, Y., & Hendrakusumah, E. (2015). Sinkronisasi perencanaan ruang wilayah (spatial planning) dengan perencanaan pembangunan (sectoral planning). *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 94-101.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. (1984). *Pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Budihardjo, Eko. (1995). *Pendekatan sistem dalam tata ruang dan pembangunan daerah untuk meningkatkan ketahanan nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Conyers, Diana dan Peter Hills. (1990). *Perencanaan sosial di dunia ketiga*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dekrita, Y. A. (2021). Kinerja keuangan rumah sakit badan layanan umum daerah: tinjauan manajemen kas, piutang, modal kerja, hutang, dan sumber daya manusia. Penerbit NEM.
- Floriati Marcini, Yosefina Andia Dekrita, Yoseph Darius Purnama Rangga. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal accounting Vol 2 No. 1*. Retrieved from
- Gheta, & Rangga, Y. D. P. . (2022). ANALYSIS OF COMMUNITY SATISFACTION INDEX ON PUBLIC SERVICES AT NELLE DISTRICT OFFICE OF SIKKA REGENCY. *International Conference of Business and Social Sciences*, 2(1), 750–758.

- Retrieved from
- Jaeng, W. M. Y. ., Yuneti, K., Gula, V. E., & Rangga, Y. D. (2023). SOSIALISASI PEMBUKUAN SEDERHANA DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN BAGI SISWA DI SMAK FRATERAN MAUMERE. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(2), 2839–2843. Retrieved from
- Juru, P. ., & Wellem, I. W. (2022). THE EFFECT OF WORKLOAD ON EMPLOYEE PERFORMANCE WITH JOB STRESS AS INTERVENING VARIABLE IN THE LAND AGENCY OFFICE OF SIKKA REGENCY. *International Conference of Business and Social Sciences*, 2(1), 623–633. Retrieved from
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maria Septiani Elisa Sugo, Yosefina Andia Dekrita, & Maria Silvana Mariabel Carcia. (2023). Analisis Common Size Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2022. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 1(5), 165–185.
- Maria Yustina Inosensia, Yosefina Andia Dekrita, & Walter Obon. (2023). Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Koperasi (Studi Pada Koperasi Yang Terdaftar Pada Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama Maumere Periode 2014-2019). *Jurnal Projemen UNIPA*, 10(2), 01–17.
- Mone, M. M. M., & Prilyastiti, H. C. (2024). Pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Perumda Air Minum Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal projemen unipa*, 11(1), 1-14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kawasan Hutan Lindung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.
- Syafie, Inu Kencana. (2007). *Manajemen pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca.
- Tarigan, Robinson. (2012). *Perencanaan pembangunan wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun. (2010). *Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2011-2030*. Kupang: PT Patria Jasa Nusaprakarsa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 2 tentang penataan tata ruang diselenggarakan berasaskan: keterpaduan, keserasian, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.
- Uno Hamzah. (2006). *Perencanaan pemberian pembelajaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wiratama, A., Prihatin, E. S., & Hardjanto, U. S. (2016). *Tugas Badan Perencanaan*

- Pembangunan Daerah dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-12.
- Widodo, S. (2017). Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(3), 166-172.